

## PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS *CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Milla Kurniasih<sup>1</sup>, Ari Wiyanti Bahari<sup>2</sup>, Elysius Kusfianto<sup>3</sup>, Sin Batarditi Ratissa<sup>4</sup>, Orpa Ferdinanda Wakem<sup>5</sup>, Magdalena S.Y.M. Yan Go<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [millakrnsh15@gmail.com](mailto:millakrnsh15@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [baharibantet@gmail.com](mailto:baharibantet@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [elysius081103@gmail.com](mailto:elysius081103@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [266kimstella@gmail.com](mailto:266kimstella@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [wakemorpa@gmail.com](mailto:wakemorpa@gmail.com)

<sup>6</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [maggy.go@gmail.com](mailto:maggy.go@gmail.com)

### Riwayat Artikel:

Received: 2/10/2024

Revised: 16/10/2024

Accepted: 30/10/2024

Published: 30/10/2024

### Corresponding Author:

Nama: Milla Kurniasih

Email: [millakrnsh15@gmail.com](mailto:millakrnsh15@gmail.com)

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



### Abstract:

*This article discusses the application of the principle of accountability in corporate governance in PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Accountability is one of the main pillars in corporate governance that ensures that the company acts in accordance with the interests of shareholders and other stakeholders. Through literature analysis and empirical data, this article identifies the extent to which BRI has applied the principles of accountability and its impact on the company's performance. The result show that PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) has implemented the principle of accountability in corporate governance quite well. This can be seen from the existence of an effective internal control system, transparency in financial reporting, and a strong risk control mechanism.*

### Keywords:

*Good Corporate Governance, Bank BRI, Accountability*

### Abstrak:

Artikel ini membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam corporate governance pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam corporate governance yang memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui analisis literatur dan data empiris, artikel ini mengidentifikasi sejauh mana BRI telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dengan cukup baik. Ini terlihat dari adanya sistem pengawasan internal yang efektif, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta mekanisme pengendalian risiko yang kuat.

### Kata kunci:

*Good Corporate Governance, Bank BRI, Akuntabilitas.*

## PENDAHULUAN

Perbankan yang mengalami krisis berpengaruh besar dalam berbagai bidang. Contohnya peristiwa *Great Depression* tahun 1930, krisis perbankan Jepang di era 90-an, serta krisis keuangan di Amerika Serikat akhir 2000-an. Peristiwa-peristiwa ini semakin mendorong perbankan sendiri untuk menjadi semakin *reliable* dalam perannya di dunia perekonomian. Belum lagi fenomena roda ekonomi yang berjalan di atas budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi sangat tidak efektif, tidak efisien atau berbiaya tinggi (*high-cost economic*) dan selalu diwarnai dengan *mark-up*. Tidak hanya bank-bank berskala Internasional, tetapi bank-bank daerah juga tengah berupaya untuk mendapat citra dan kepercayaan yang baik kepada masyarakat pun untuk perekonomian di daerah.

Krisis keuangan global yang dialami dunia secara khususnya di Asia dan di Indonesia pada tahun 1997 secara eksplisit menunjukkan bahwa bisnis perlu mengadopsi strategi yang berbeda dalam praktik mereka, kesadaran tentang pentingnya *Corporate Governance* mulai timbul. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena secara langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan Perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha.

Ardianingsih, (2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan perusahaan erat kaitannya dengan masalah degradasi moral di kalangan pelaku bisnis, masih lemahnya atau tidak adanya sistem *Corporate Governance* yang baik serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang belum dipublikasikan kepada publik. Susiana dan Herawaty, (2007) belum diterapkannya mekanisme GCG yang baik pada perusahaan, ini dapat menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari terpuruknya harga saham.

Menurut Iskander dan Chamlou (2000) krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya *corporate governance* di negara-negara ini, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan yang belum dilakukan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris dan terabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *Corporate Governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Friendly (2017) menyatakan bahwa keberadaan sebuah Perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki tujuan tertentu. Visi dan misi tujuan perusahaan adalah deskripsi formal dan diartikulasikan tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui operasinya. Dengan adanya struktur tata kelola yang solid, semua tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat diwujudkan. Selain itu kolaborasi yang efektif antara semua karyawan dan manajemen puncak sangat penting. Menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam prosedur manajemen organisasi sangat penting untuk keberhasilan berkelanjutan dan memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan jika para pemimpinnya memahami ide-ide yang dapat diterapkan secara umum ini.

Kendala pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi (Kaihatu, 2006). Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mulai mengenalkan *Good Corporate Governance* melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Hal tersebut didukung oleh pendapat Kaihatu (2006), yang menyatakan bahwa BUMN merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran adalah lima pilar yang mendasari prinsip-prinsip GCG. Menurut Mahaendrayasa dan Putri (2017), kelima prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut : (1) transparansi mengacu pada komitmen Perusahaan untuk bersikap objektif dalam transaksi bisnisnya; (2) akuntabilitas mengacu pada komitmen Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (3) responsibility mengacu pada kewajiban Perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; (4) independensi mengacu pada komitmen Perusahaan untuk tidak terafiliasi dengan pihak luar manapun; dan (5) kewajaran mengacu pada komitmen perusahaan untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif.

*Corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip utama *corporate governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Akuntabilitas menekankan pada kewajiban manajemen untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Artikel ini berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas di BRI dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan.

## METODE

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2005), analisis data kualitatif berarti bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dikontrol, mensintesisikannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah tahap pengumpulan data selesai, data akan diolah

dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. *Aspek governance structure, Aspek governance process, Aspek governance outcome.*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BRI memiliki struktur tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara efektif.

BRI secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan, laporan tata kelola perusahaan, dan laporan keberlanjutan. Laporan-laporan ini dibuat dengan standar internasional dan diaudit oleh auditor independen. Transparansi dalam pelaporan ini merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan akuntabilitas.

BRI menerapkan sistem evaluasi kinerja yang ketat untuk memastikan bahwa tujuan strategis perusahaan tercapai. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan manajemen. Selain itu, internal audit di BRI berfungsi untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BRI aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan komunikasi terbuka dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya, BRI memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan akuntabilitas dalam operasionalnya. Beberapa langkah tersebut antara lain:

1. Penerapan struktur tata kelola yang kuat dan independen.
2. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional.
3. Evaluasi kinerja yang berkala dan berkelanjutan.
4. Pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

## **SIMPULAN**

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dengan cukup baik. Ini terlihat dari adanya sistem pengawasan internal yang efektif, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta mekanisme pengendalian risiko yang kuat. BRI menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, baik dari sisi hukum maupun standar tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya BRI telah mengimplementasikan transparansi dalam pelaporan, baik kepada pemegang saham maupun publik. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen. Pada aspek manajemen risiko BRI memiliki kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul

dalam operasional perusahaan. Ini mencakup risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas. Kemudian pada aspek organ perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi BRI memiliki peran yang penting dalam memastikan penerapan prinsip akuntabilitas. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya operasional perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Rakyat Indonesia. (2020). Corporate governance. Diakses dari <https://bri.co.id/corporategovernance>
- Cornett, M. M., McNutt, J. J., & Tehranian, H. (2009). Corporate governance and earnings management at large U.S. bank holding companies. *Journal of Corporate Finance*, 15(4), 412-430.
- Elisa, N., Rabi, J., Agustian, R. P. D., Aba, W. S., & Cirawu, A. (2024). ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. GUDANG GARAM, TBK. *Wallaby: Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 1(1), 44-55.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khadija, K., Rombai, N. M. J., Tikun, A., Rahakbauw, F. E., Rau, E., & Alfianzyar, M. (2024). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK BCA CABANG MERAUKE. *Wallaby: Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 1(1), 33-43.
- Solihin, I. (2009). Corporate governance dan praktek di Indonesia. Salemba Empat.
- Sun, L., & Li, J. (2011). Corporate governance and dividend policy in China. *Journal of Corporate Finance*, 17(5), 1212-1227.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan tahunan 2020. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Jakarta: OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020). Laporan tahunan 2020.